

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PEMBERI JAMINAN FIDUSIA YANG KARENA
KESENGAJAANNYA MELAHIRKAN PERJANJIAN FIDUSIA DALAM
HUBUNGANNYA DENGAN PASAL 35 UNDANG-UNDANG NO 42 TAHUN 1999
TENTANG FIDUSIA
(Studi Kasus PT Sinar Mas Multi Finance)**

**Oleh :
David Kurniawan Lingga**

Abstract

Fiducia at Law no 42 tahun 1999 to regulate date 30 september 1999 and to public in Regulate Constitusi at 1999 Nomor 168 to formulate as delegasi to private and fiducia basic. Together with demand of nowadays, conventional pawning is considered unable to accommodate public needs especially small entrepreneur related to object that has to be guaranteed. Therefore to fulfill demand of public, pawn-shop has launched new program with giving installment payment with fiduciary system. The fiduciary system considered can overcome difficulties of public especially small entrepreneurs in obtaining credit with guarantee. Therefore credit can be agreed and the guarantee remains to be occupied by debtor. As the government program to support giving credit to small and middle entrepreneur, giving credit based on fiduciary system can help not only debtor but also creditor. One of parameters of good guarantee is when the guarantee right can be executed immediately with simple process, efficient, and having law certainty. The research methodology used was Jurisdical Empirical, which analyzes the extend of the effectiveness of the applying regulation, which in this case is for analyzing qualitatively the execution of fiduciary guarantee at pawn shop. The data used was primary data that was taken directly from the field by using interview and questioners, and secondary data that was literature. The data analysis used was analysis qualitative by using deductive concluding..

Key words : Childbirth agreement Fiduciary

Abstrak

Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia yang diundangkan pada tanggal 30 september 1999 dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor.168 yang dirumuskan sebagai penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan. Sehubungan dengan penjaminan diatas, maka yang harus dilakukan oleh penerima fidusia (kreditor) apabila pemberi fidusia (debtor) berbuat kesalahan yang berupa kesengajaan yang dilakukan pemberi fidusia (debtor) berupa mamalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak. Melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia., maka dalam peristiwa seperti itu, penerima fidusia (kreditor) bisa melaksanakan eksekusinya atas benda jaminan fidusia dan menuntut secara pidana yang diatur dalam pasal 35 Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Fidusia. Secara umum eksekusi merupakan pelaksanaan atau keputusan pengadilan atau akta, maka pengambilan pelunasan kewajiban kreditor melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitor. Sejalan dengan program pemerintah untuk menggiatkan pemberian kredit kepada pengusaha kecil dan golongan ekonomi lemah yang mana merupakan bagian terbesar dari rakyat Indonesia. Sehingga diharapkan dengan kredit berdasarkan sistem Fidusia dapat membantu baik bagi penerima kredit maupun pemberi kredit. Salah satu parameter dari jaminan hutang kebendaan yang baik adalah bila hak jaminan dapat dieksekusi secara cepat dengan proses yang sederhana, efisien dan mengandung kepastian hukum. Metode penelitian menggunakan metode Yuridis Empiris, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan/perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang pelaksanaan jaminan fidusia Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu wawancara dan data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Analisa yang digunakan adalah analisis kualitatif yang penarikan kesimpulannya secara deduktif.

Kata Kunci : Melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia

Pendahuluan

Krisis yang dialami oleh pengadilan sebagai bentuk pendekatan litigatif menyebabkan penggunaan paradigma litigatif tidak lagi efisien dan efektif untuk menyelesaikan Kejahatan di bidang Ekonomi. Padahal, keberadaan mekanisme penyelesaian yang reliable merupakan salah satu faktor utama yang menjadi pertimbangan investor untuk melakukan investasi di suatu negara. Sekarang ini banyak negara berlomba-lomba untuk meningkatkan dan membenahi infrastruktur dan suprastrukturnya sehingga mempunyai daya tarik yang tinggi. Hal inilah yang sekarang menyebabkan banyak negara mereformasi pengadilannya dan membangun sarana penyelesaian sengketa alternatif atau menciptakan banyak akses atau ruang agar bisa dimanfaatkan pelaku ekonomi untuk mendapat keadilan.

Ketidak mampuan pengadilan untuk mengemban amanat menyelesaikan secara efektif dan efisien menimbulkan keraguan dari pencari keadilan, padahal apabila dari perkembangan sistem hukum, pengadilan merupakan tahapan pertama dari evolusi penyelesaian Suatu Masalah hukum. Pengadilan dihubungkan dengan Perkembangan ekonomi saat ini , sehubungan perkembangan perkreditan dalam masyarakat Indonesia sekarang ini memerlukan bentuk-bentuk jaminan perlindungan dari segi pembiayaan, di mana orang memerlukan kredit dengan jaminan barang bergerak, namun tersebut masih tetap dapat menggunakannya untuk keperluan sehari-hari maupun untuk keperluan usahanya, jaminan kredit yang demikian tidak dapat ditampung hanya oleh peraturan-peraturan gadai, yang tidak memungkinkan benda jaminan tersebut tetap berada pada yang menggadaikan.

Atas dasar itu maka suatu perjanjian yang berlandaskan penyerahan milik atas suatu benda sebagai jaminan, merupakan suatu perjanjian untuk memberikan jaminan dengan hak tanggungan. Yang berpiutang (kreditor) menjadi pemilik dari benda itu sebagai demikian pada hakikatnya mempunyai kedudukan yang lebih kuat dari seorang pemegang hak. Apabila yang berutang melunasi utangnya itu, maka milik benda itu masih beralih kembali kepada pemilik benda yang berutang dan yang berpiutang untuk mengembalikan benda itu kepada yang berutang.

Oleh karena itu guna memenuhi kebutuhan tersebut dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, maka disyahrkannya Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia yang diundangkan pada tanggal 30 september 1999 dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor.168 yang dirumuskan sebagai penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan.

Sehubungan dengan penjaminan ini, apa yang harus dilakukan oleh penerima fidusia (kreditor) apabila pemberi fidusia (debitor) berbuat kesalahan yang berupa kesengajaan yang

dilakukan pemberi fidusia (debitor) berupa mamalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak. Melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia., maka dalam peristiwa seperti itu, penerima fidusia (kreditor) bisa melaksanakan eksekusinya atas benda jaminan fidusia dan menuntut secara pidana yang diatur dalam pasal 35 Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Fidusia. Secara umum eksekusi merupakan pelaksanaan atau keputusan pengadilan atau akta, maka pengambilan pelunasan kewajiban kreditor melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitor. Perlu disepakati terlebih dahulu bahwa yang dinamakan eksekusi adalah pelaksanaan keputusan pengadilan atau akta. Tujuan dari pada eksekusi adalah pengambilan pelunasan kewajiban debitor melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitor atau pihak ketiga pemberi jaminan.

Salah satu ciri dari jaminan utang kebendaan yang baik adalah apabila dapat eksekusinya secara cepat dengan proses sederhana, efisien dan mengandung kepastian hukum. Misalnya ketentuan eksekusi fidusia di Amerika Serikat yang membolehkan pihak kreditor mengambil sendiri objek jaminan fidusia asal dapat dihindari perkelahian/percekcokan (breaking the peace). Barang tersebut boleh dijual dimuka umum atau dibawah tangan asalkan dilakukan dengan itikad baik.

Tentu saja fidusia sebagai salah satu jenis jaminan utang juga harus memiliki unsur-unsur cepat, murah, dan pasti tersebut. Sebab selama ini (sebelum keluarnya Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999) tidak ada kejelasan bagaimana caranya mengeksekusi fidusia, sehingga tidak ada ketentuan yang mengaturnya.

Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 29 ayat 1(a) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu berdasarkan pada title eksekutorial dalam Sertifikat fidusia yang dicantumkan kata-kata Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Irah-irah Inilah Yang memberikan titel eksekutorial yang mensejajarkan kekuatan akta tersebut dengan putusan pengadilan. Eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan title eksekutorial
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia itu sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan.
- c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tinggi yang menguntungkan para pihak.

Jadi prinsipnya adalah bahwa penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan melalui lelang suatu lelang dimuka umum dan dimungkinkan juga dilakukan

penjualan dibawah tangan, asalkan hal tersebut disepakati oleh pemberi dan penerima fidusia melalui perjanjian yang merupakan peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Melalui perjanjian terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat perjanjian yang telah mereka buat tersebut. Dalam hal ini fungsi perjanjian sama dengan perundang-undangan, tetapi hanya berlaku khusus terhadap para pembuatnya saja. Secara hukum, perjanjian dapat di paksakan berlaku melalui pengadilan. Hukum memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran perjanjian atau ingkar janji (wanprestasi).

Suatu asas hukum penting berkaitan dengan berlakunya perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak. Artinya, pihak-pihak bebas untuk membuat perjanjian apa saja, baik yang sudah ada pengaturnya maupun yang belum ada pengaturannya maupun yang belum ada pengaturannya dan bebas menentukan sendiri isi perjanjian

Namun, kebebasan tersebut tidak mutlak karena terdapat pembatasannya, yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Dengan demikian lembaga jaminan perlu mendapat perhatian serius sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam praktek kehidupan masyarakat dalam rangka pembangunan Indonesia khususnya dibidang hukum, dalam hal ini penulis melihat perkara kasus dilapangan yang dihubungkan dengan pertanggungjawaban kebanyakan di pengadilan Terdakawa seringkali dikenakan Pasal 362 dan KUHP, padahal dalam hal ini dipasal disebutkan bahwa:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Dan terdakwa dapat dikenakan Pasal 35 Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Fidusia yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja mamalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak melahirkan Perjanjian Jaminan Fidusia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Dari paparan di atas penulis menyimpulkan bahwa terdakwa dapat dikenakan Pasal Perbarengan atau istilahnya *saamenloop* yang ditaur dalam KUHP karena banyak hal yang dapat dikenakan terhadap terdakwa menurut teori bahwa pada dasarnya yang dimaksud dengan perbarengan ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.

Permasalahan

1. Bagaimana delik unsur karena kesengajaannya melakukan perjanjian fidusia dalam pasal 35 Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Fidusia?
2. Bagaimana Penerapan Pasal 35 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia Pada Saat Ini?

Pembahasan

Akibat Hukum Dikeluarkannya UU Fidusia Terhadap Pemberi Jaminan Fidusia berdasarkan pasal 35 akibat hukum untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya apabila pemberi fidusia ternyata terbukti memalsukan jaminan fidusianya.

Dalam Hukum pidana mengenal teori pertanggungjawaban pidana. Yang mana Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Namun orang yang melakukan tindak pidana belum tentu dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan, hal ini tergantung pada “ apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan “, yang merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana : “ tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld* ; *actus non facit reum nisi mens sit rea*) “. Asas ini memang tidak diatur dalam hukum tertulis tapi dalam hukum tidak tertulis yang juga berlaku di Indonesia. Namun lain halnya dengan hukum pidana fiskal, yang tidak memakai kesalahan. Jadi jika orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau dirampas. Pertanggung jawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar dinamakan *leer van het materiele feit* (*fait materielle*) Dalam buku – buku Belanda pada umumnya tidak mengadakan pemisahan antara dilarangnya perbuatan (*strafbaar heid van het feit*) dan dipidanya orang yang melakukan perbuatan tersebut (*strafbaar heid van de persoon*). Dengan kata lain, *schuld* (kesalahan) tidak dapat dimengerti tanpa adanya *wederrechtelijkheid* (sifat melawan hukum), tapi sebaliknya sifat melawan hukum mungkin ada tanpa adanya kesalahan[2]. Prof. Moeljatno mengartikannya ; orang

tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan tindak pidana.

Selain itu apabila seseorang dapat dipertanggungjawabkan maka untuk Keefektifan hukum maka hukum yang berlaku dapat dilaksanakan, ditaati dan berdaya guna sebagai alat kontrol sosial atau sesuai tujuan dibuatnya hukum tersebut. Tentang efektif atau tidak efektifnya suatu sanksi dapat diukur dari pengertian bahwa efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Jadi Efektivitas disebut juga efektif, apabila tercapainya tujuan(sanksi) atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Soewarno yang mengatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

pada kasus Rajusmendra dan Iwan di pelapor dari Bank sinar mas dimana kedua belah pihak saling melaporkan ke sektor pontianak selatan yang saat ini kasusnya masih ditindaklanjuti penyidik untuk dilimpahkan perkaranya kepada kejaksaan, duduk perkara kasus tersebut adalah berawal dari pelaporan saudara Iwandi karyawan bank sinar mas karena merasa ditipu oleh saudara sulih dengan menjaminkan BPKB dengan No.C7245153G,Kawasaki Ninja 150 J Th 2003, warna Hijau,KB 5999ML, dengan No Rangka :MH4KRI50J3KP19688, dan No mesin : KR150CEP31778 BPKB Atas Nama YUDO KRISTIANTO, terjadi pada saat menggadaikan BPKB Motor di (PT.Sinar Mas Multi Finance) dengan pinjaman pokok sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan Angsuran selama 18 bulan, dan sudah dibayar saudara suleha sebanyak 3 bulan dan masih menunggak pembayaran selama 15 bulan, setelah di cek kerumah (saudara suleha) barulah diketahui bahwa BPKB motor dan Sepeda motor tersebut bukan milik saudara suleha.

Melalui Rajusmendra Pemilik kendaraan motor dalam duduk perkara diatas juga melaporkan bahwa pelapor merasa barang miliknya diambil tanpa ijin oleh orang lain hal ini diketahuinya pada saat hendak membayar pajak sepeda motor dan melakukan balik nama bahwa BPKB aslinya telah diambil, setelah berapa lama datang pihak sinar mas multi finance kerumah dengan maksud akan melakukan penarikan 1 sepeda motor Jenis Kawasaki milik pelapor, lalu saudara pelapor mendapat informasi dari pihak sinar mas multi finance bahwa pengajuan pembelian motor secara kredit dilakukan oleh Suliha, barulah saudara Rajusmendra mengetahui kalau dia ditipu.

Apabila perkara tersebut di lanjutkan ke meja hijau maka suleha dapat dikenakan pasal 35 Undang-undang No 42 Tahun 1999 yang menyatakan :

“Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak melahirkan Perjanjian Jaminan Fidusia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

unsur-unsur Pasal adalah sebagai Pasal 35 adalah Sebagai berikut :

- Setiap Orang
- Dengan Sengaja Memalsukan, Mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan
- Apabila diketahui oleh salah satu pihak melahirkan perjanjian jaminan fidusia.

Dari unsur-unsur diatas penulis mencoba menjelaskan sebagai berikut:

- **Unsur Setiap Orang :**

unsur Setiap orang adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang yang daripadanya dapat dimintakan pertanggung jawab pidana, sehingga orang tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak di bawah pengampuan

- **Dengan Sengaja Memalsukan, Mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan**

Rajusmendra Pemilik kendaraan motor melaporkan bahwa pelapor merasa barang miliknya diambil tanpa ijin oleh orang lain hal ini diketahuinya pada saat hendak membayar pajak sepeda motor dan melakukan balik nama bahwa BPKB aslinya telah diambil, setelah berapa lama datang pihak sinar mas multi finance kerumah dengan maksud akan melakukan penarikan 1 sepeda motor Jenis Kawasaki milik pelapor, lalu saudara pelapor mendapat informasi dari pihak sinar mas multi finance bahwa pengajuan pembelian motor secara kredit dilakukan oleh Suliha, barulah saudara Rajusmendra mengetahui kalau dia ditipu. Dalam hal ini suleha dapat masuk pada unsur ini karena suleha menjaminkan BPKB a.n Rajusmedra tanpa sepengetahuannya.

- **Apabila diketahui oleh salah satu pihak melahirkan perjanjian jaminan fidusia.**

Dalam hal ini saudara rajusmendra yang pemilik BPKB mengetahui secara nyata akan BPKB nya di jaminkan ke bank setelah pihak sinar mas multi finance kerumah dengan maksud akan melakukan penarikan 1 sepeda motor Jenis Kawasaki milik pelapor, lalu saudara pelapor mendapat informasi dari pihak sinar mas multi finance bahwa pengajuan pembelian motor secara kredit dilakukan oleh Suliha.

Dari analisis kasus di atas apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi penulis berkesimpulan bahwa undang-undang fidusia dapat digunakan atas dasar pendapat sudarto bahwa keberadaan “undang-undang pidana khusus” dalam rangka politik kriminal merupakan kebutuhan yang tidak mungkin dapat dihindari maka dapat dikenakan. Selain itu juga penulis menjelaskan lagi bahwa Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggung jawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

regulatif, semiadministratif, dan bahkan semiyudikatif. Oleh karena itulah muncul istilah badan-badan independen dan berhak mengatur dirinya sendiri (*independent and self-regulatory bodies*) yang berkembang di berbagai negara. Akan tetapi, gejala umum yang sering kali dihadapi oleh negara-negara yang membentuk lembaga-lembaga ekstra itu adalah persoalan mekanisme akuntabilitas, kedudukannya dalam struktur ketatanegaraan, dan pola hubungan kerjanya dengan kekuasaan pemerintah, kekuasaan membuat undang-undang, dan kekuasaan kehakiman. Hal ini tidak terlepas dari pergulatan politik yang terjadi antara kekuatan politik pemerintah dan parlemen saat keduanya memperebutkan pengaruh dari rakyat dalam pengelolaan negara. Kekuatan politik pemerintah di era demokrasi yang “dipaksa” harus berbagi dengan kekuatan lain, khususnya parlemen, inilah yang mengakibatkan persaingan di antara keduanya tidak terelakkan. Tentu saja hal ini membawa dampak negatif berupa ketidakjelasan pertanggungjawaban dan pola kerja lembaga-lembaga ekstra tersebut, karena pembentukannya sering kali tidak dilandasi kebutuhan rasional dan landasan yuridis yang cukup. Sebagai lembaga independen yang terlepas dari hubungan struktural dengan pemerintah, pemerintah tentu tidak berada dalam kapasitas untuk bisa mengontrol secara khusus terhadap lembaga-lembaga ekstra tersebut. Ketidakjelasan mekanisme pertanggungjawaban ini, menurut Alder, dikarenakan ketentuan yang mengatur lembaga-lembaga ekstra itu kadang-kadang menciptakan mekanisme tersendiri yang berbeda satu sama lain tanpa ada perangkat konstitusional yang logis.

- **Penguatan Kedudukan dan Independensi KPK**

Inti daripada independensi bagi KPK adalah kemampuan KPK untuk berperilaku obyektif dalam merumuskan kebijakannya sendiri tanpa dipengaruhi kepentingan “luar”. Kepentingan luar ini umumnya dipersepsikan sebagai kepentingan politis penguasa. Independensi tidak selalu dapat diraih dengan hanya mengandalkan kerangka hukum yang menetapkan bahwa KPK dibentuk oleh Undang-Undang khusus yang memberikan “fasilitas” independensi dengan baik. Banyak kasus di beberapa negara yang KPK nya tetap sukses dan independen walaupun tetap harus bertanggung jawab terhadap presiden atau kepala pemerintahan, seperti yang terjadi di Singapura dan Hongkong.

Independensi KPK lebih banyak dinilai oleh (i) Tersedianya mekanisme yang transparan untuk menilai kinerja KPK yang bersangkutan, sehingga dapat menjaga agar fungsinya tidak bias (ii) Pemilihan pimpinan KPK menggunakan prosedur yang demokratis, transparan dan obyektif (iii) Pimpinan KPK yang terpilih dikenal sebagai orang dengan integritas yang baik dan telah teruji. Seluruh KPK yang telah teruji independensinya terbukti mampu memberikan hasil yang amat baik dalam pemberantasan korupsi di negaranya.

- **Penguatan Tugas, Fungsi dan Wewenang**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, yang mempunyai tugas :

- Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
- Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
- Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 KPK berperan dalam melakukan tugas koordinasi ini. Dalam melaksanakan tugas-tugas dimaksud, khususnya dalam rangka melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, pada KPK melekat wewenang untuk :

- Mengoordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.
- Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana
- Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.
- Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Kemudian dalam rangka melaksanakan tugas yang kedua berupa tugas supervisi, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian atau penelaahan terhadap instansi yang

menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang menjalankan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang melaksanakan pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa KPK merupakan lembaga super body, terlebih karena padanya juga memiliki wewenang untuk mengambilalih pnyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan dari KPK.

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud, KPK berwenang :

- Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.
- Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian keluar negeri.
- Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa.
- Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait.
- Memerintahkan Kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya.
- Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa (orang perorangan atau korporasi) kepada instansi terkait.
- Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.
- Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.
- Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Di samping melakukan upaya penegakan hukum secara represif,KPK juga bertugas melakukan tindakan pencegahan (Preventif). Untuk kepentingan dimaksud KPK berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut :

- Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara.
- Menerima laporan dan menetapkan status grafitasi.
- Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan.
- Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi.
- Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum.

- Melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, KPK mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintahan.
- Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintahan untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi.
- Melaporkan Kepada presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan badan pemeriksa keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

KPK sebagai lembaga negara baru yang dibentuk dengan amanat UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan UU KPK, KPK berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. KPK dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi. KPK bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR dan BPK.

KPK sebagai lembaga negara yang diatur di dalam UU atau yang dikenal dengan sebutan organ undang-undang, dalam ranah sengketa kewenangan lembaga negara yang melibatkan KPK, maka KPK tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam perkaranya di mahkamah konstitusi.

• **Penguatan Dukungan Sumber daya**

KPK sebagai sebuah lembaga negara baru yang diharapkan dapat mengembalikan citra penegakan hukum di Indonesia. Tingginya beban kerja lembaga yang telah ada sehingga diperlukan lembaga baru sebagai pelengkap yang di isi SDM yang profesional dengan Track record yang baik. Demi tercapainya pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat, maka pemerintah memandang perlu untuk membentuk lembaga baru, dalam hal ini beban kerja kepolisian dan kejaksaan dianggap terlalu banyak sehingga banyak terjadi tunggakan perkara. Sebagai langkah penyesuaian negara terhadap perkembangan sistem ketatanegaraan dan tuntutan masyarakat perubahan sistem ketatanegaraan RI memaksa negara melakukan reformasi dalam berbagai lini, termasuk reformasi kelembagaan. Beberapa lembaga Non Struktural dibentuk untuk mengakomodir hal ini, termasuk penegakan supremasi hukum, perbaikan citra pengadilan.

Perkembangan kewenangan bidang pemerintahan tertentu yang diselenggarakan oleh organisasi pemerintahan yang semakin kompleks, sehingga tidak dimungkinkan lagi dikelola secara regular dalam organisasi yang bersangkutan. Dalam rangka menerapkan tata kelola

pemerintahan yang baik (*good governance*). Timbul pemikiran bahwa dengan dibentuknya lembaga-lembaga tambahan yang bersifat non structural akan lebih membuka peluang dalam upaya menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Perlu disadari bahwa pembentukan KPK beranjak dari asumsi bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan luar biasa sehingga dibutuhkan lembaga yang luar biasa dengan kewenangan yang luar biasa pula serta diisi sumber daya pilihan guna memberantas korupsi yang kian multidimensional.

- **Penataan Hubungan Kelembagaan**

Keberadaan KPK sebagai lembaga Negara yang tidak diatur di dalam UUD berpengaruh dalam menjalankan fungsi yang dimiliki. Peran KPK dalam merealisasikan tugas, kewajiban dan kewenangan yang dimiliki dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia masih sangat terbatas. Hal ini dikarenakan sempitnya ruang gerak KPK di dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-undang No 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam melakukan kegiatannya KPK mendapatkan pengawasan dari Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan. Hal ini membuktikan bahwa peran KPK masih dibatasi oleh ketiga lembaga tersebut. Di lain pihak kenyataan demikian akan menimbulkan suatu masalah apabila yang menjadi sasaran dari pemberantasan tindak pidana korupsi oleh KPK adalah salah satu dari lembaga-lembaga tersebut. Karena itulah, demi mendukung optimalisasi kinerja dan produktifitas KPK maka tidak saja dibutuhkan pembenahan secara internal dalam tubuh KPK namun juga perluasan ruang gerak KPK dalam peraturan perundang-undangan.

Dari uraian diatas penulis mencoba menyimpulkan keberadaan KPK sebagai lembaga bantu atau penunjang dilihat dari prosudur pembentukannya lembaga tersebut selalu mendapat Konflik antara norma yang lebih tinggi dengan norma yang lebih rendah muncul ini adalah masalah undang-undang yang tidak konstitusional. Biasanya dikatakan bahwa suatu undang-undang yang tidak konstitusional adalah invalid. Suatu norma yang tidak valid adalah sesuatu yang tidak eksis sebagai norma adalah bukan sesuatu entitas hukum.

Ekspresi undang-undang yang tidak konstitusional terhadap suatu undang-undang yang diakui valid adalah suatu yang kontradiktif. Undang-undang adalah valid hanya karena sesuai dengan konstitusi dan tidak dapat valid jika bertentangan dengan konstitusi. Satu-satunya alasan untuk validitas suatu undang-undang adalah karena telah dibuat dengan cara yang ditentukan oleh konstitusi. Maka arti dari ekspresi tersebut adalah bahwa suatu undang-undang sesuai dengan konstitusi, mungkin untuk alasan tertentu dapat dibatalkan (*annuled*) dengan cara lain selain yang biasanya. Biasanya, suatu undang-undang

tidak diberlakukan dengan undang-undang lain sesuai dengan prinsip *lex posterior derogat priori* atau tidak diberlakukan dengan aturan hukum kebiasaan yang bertentangan.

Jika konstitusi menentukan suatu prosedur tertentu yang harus diikuti dalam menetapkan undang-undang dan juga menentukan aturan tertentu tentang isinya, maka ada kemungkinan bahwa disuatu waktu legeslatif tidak mengikuti petunjuk tersebut. Jika lembaga ini berbeda dari lembaga legiskatif, maka membentuk suatu otoritas diatas legeslatif. Hal ini mungkin menjadi sesuatu yang tidak dikehendaki secara politik, apalagi jika memiliki kekuasaan untuk tidak memberlakukan suatu undang-undang yang dipandang tidak konstitusional. Jika tidak ada lembaga yang berbeda legeslatif untuk menyelidiki konstitusionalitas undang-undang.

Lembaga yang mengontrol lembaga-lembaga negara dapat menghapuskan secara keseluruhan undang-undang yang tidak konstitusional sehingga tidak dapat diaplikasikan oleh lembaga lain. Dalam kasus konkrit ketika menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak konstitusional, sedangkan lembaga lain tetap diwajibkan menetapkannya sepanjang suatu undang-undang belum dibatalkan maka adalah konstitusional.

Hal ini merupakan konsekuensi dari supremasi konstitusi, di mana konstitusi diposisikan sebagai hukum tertinggi yang mengatur dan membatasi kekuasaan lembaga-lembaga penyelenggara negara. Dengan demikian, Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 ini juga telah meniadakan konsep superioritas suatu lembaga negara atas lembaga-lembaga negara lainnya dari struktur ketatanegaraan Republik Indonesia (RI). Masyarakat yang semakin berkembang ternyata menghendaki negara memiliki struktur organisasi yang lebih responsif terhadap tuntutan mereka. Terwujudnya efektivitas dan efisiensi baik dalam pelaksanaan pelayanan publik maupun dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan juga menjadi harapan masyarakat yang ditumpukan kepada negara. kecenderungan munculnya lembaga-lembaga negara baru terjadi sebagai konsekuensi dilakukannya perubahan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945. Lembaga-lembaga baru itu biasa dikenal dengan istilah *state auxiliary organs* atau *state auxiliary institutions* yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai lembaga negara Penunjang dan merupakan lembaga negara yang bersifat sebagai penunjang.

Penutup

Salah satu cara untuk melindungi kepentingan Kreditur (sebagai Fidusia) adalah dengan memberikan ketentuan yang pasti akan Kreditur. Diaturnya data yang lengkap yang harus termuat dalam jaminan Fidusia (Pasal 6 UUJF), secara tidak langsung

memberikan pegangan yang kuat bagi Kreditur sebagai Penerima Fidusia, khususnya tagihan mana yang dijamin dan besarnya nilai jaminan, yang menentukan seberapa besar tagihan kreditur preferen. Perlindungan hukum dan kepentingan kreditur dalam UUJF dapat dilihat pada Pasal 20 UUJF :

Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda tersebut, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia". Ketentuan menegaskan bahwa jaminan fidusia mempunyai sifat kebendaan dan berlaku terhadapnya asas *droit de suite*, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.

Perlindungan yang sama juga dapat dilihat dalam Pasal 23 ayat (2) : Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dan Penerima Fidusia". Sanksi terhadap ketentuan di atas adalah pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yang merupakan fokus penulisan penelitian ini dan Pasal 36 UUJF yang menyatakan : "Setiap orang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah)" Atas segala tindakan dan kelalaian pemberi fidusia, penerima fidusia berdasarkan karena kelalaian tersebut tidak bertanggung jawab, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UUJF : "Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia". Pada intinya maksud/tujuan dari perjanjian jaminan fidusia dari segi perlindungan hukum bagi kreditur adalah memberikan hak istimewa atau hak didahulukan baginya guna pelunasan hutang-hutang, debitur padanya (asas *schuld dan haftung*). Lebih jauh perlindungan hukum terhadap hak atas piutang yang didahulukan dapat dilihat pada ketentuan Pasal 27 UUJF :

- Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.
- Hak didahulukan sebagaimana, dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- Hak yang didahulukan dan Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Secara keseluruhan maka, beberapa hal yang dapat menunjukkan adanya perlindungan hukum terhadap kreditur (Penerima Fidusia) menurut UU No. 42 tahun 1999 antara lain sebagai berikut:

- Adanya lembaga pendaftaran jaminan fidusia, yang tidak lain adalah untuk menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia;
- Adanya larangan pemberi fidusia untuk memfidusiakan ulang obyek jaminan fidusia (pasal 17);
- Adanya ketentuan bahwa Pemberi Fidusia tidak diperbolehkan untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan (pasal 23 Sub 2);
- Adanya ketentuan pemberi fidusia wajib menyerahkan benda jaminan, kalau kreditur hendak melaksanakan eksekusi atas obyek jaminan fidusia;
- Adanya ketentuan pidana dalam Undang-undang Jaminan Fidusia.

Akta Notaris merupakan salah satu wujud akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Tahap selanjutnya dalam proses perjanjian jaminan fidusia ialah pemberian jaminan dalam bentuk akta notaris dan kewajiban mendaftarkan jaminan fidusia itu, tindakan tersebut untuk memenuhi salah satu asas dari perjanjian pembebanan beban dengan jaminan fidusia. adalah yaitu asas publisitas. Dengan didaftarkan jaminan fidusia maka asas publisitas terpenuhi sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia akan memberikan informasi data-data baik mengenai ikatan jaminannya, maupun bendanya, karena dalam suatu pendaftaran fidusia semua hal tersebut dicatat dengan teliti oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 13 Ayat (2) UUJF yang semuanya bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum,

Daftar Pustaka

Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

Arief Nawawi Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Fuady Munir, *Jaminan Fidusia* (Bandung: PT. Citra aditya, 2000)

----- *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002 hal.199

Halle, *Credit Analisis A Complete Guide*, (New York : Jhon Wiley and Sons Inc 1983)

Kansil C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Indonesia*, Balai pusataka, jakarta, 1989

Moelyatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Pengukuhan Guruh besar FH, UGM, 1980

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992,

Grace P. Nugroho, 2009, *Eksekusi Terhadap Objek Perjanjian Fidusia Dengan Akta Dibawah Tangan*, [http://www. Hukum Online](http://www.HukumOnline).

J. Satrio, *Beberapa Seki Hukum Standarisasi Perjanjian Kredit*, Seminar

Packer L.Herbert, *The Limits of the Criminal Sanction*, California; Stanford University Press, 1968, halaman 344-346.

Rony Hanitijo Soemitro,SH METODE PENELITIAN HUKUM, Ghalia Indonesia,Jakarta,1985

Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakanaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakanaksanaan Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.

Soedarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), Semarang, 1990,

Rahardjo, Satjipto, Hukum dan Masyarakat,Angkasa,Bandung,1986.

Saleh,Roeslan,Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana,Aksara Baru,Jakarta,1978.

Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,Politea, Bogor 1993

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”*,(Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004),

Soemitro Hanitijo Rony, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*,(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983),

Purwahid Patrik, *Peranan Perjanjian Baku dalam Masyarakat*, Makalah dalam seminar Masalah Standard Kontrak Dalam perjanjian

Kredit, Surabaya, 11 Desember 1993.

Warassih Esmi, ” *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*,2005

Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia